

RESEARCH ARTICLE

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Armawan Arifin^{1*}, Citra Ayni Kamaruddin², Sri Astuty³, Irwandi⁴, Muhammad Imam Ma'ruf⁵

^{1*,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia.

Corresponding Email: armawanarifin028@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 28 April 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Arifin, A., Kamaruddin, C. A., Astuty, S., Irwandi, I., & Ma'ruf, M. I. (2026). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4762-4772. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.7058>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga sektor ini dipilih karena kontribusinya yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan data time series dari tahun 2012 hingga 2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, secara parsial, dampak pengeluaran pemerintah berbeda-beda antara ketiga sektor. Pengeluaran pada sektor kesehatan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sektor pendidikan dan infrastruktur. Meskipun pengeluaran pada ketiga sektor ini penting, efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah dalam masing-masing sektor berperan besar dalam menentukan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang efisien dan tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertimbangkan prioritas dan efisiensi dalam alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Pertumbuhan Ekonomi; Sulawesi Selatan.

Abstract

This study aims to analyze the impact of government spending on education, health, and infrastructure on economic growth in South Sulawesi Province. These three sectors were chosen because of their significant contribution to sustainable development, particularly in improving the quality of human resources and providing infrastructure that supports economic activity. The method used in this study is a quantitative approach with time series data from 2012 to 2024. The analysis was conducted using multiple linear regression with the Ordinary Least Squares (OLS) method. The results show that, simultaneously, government spending in the education, health, and infrastructure sectors has a significant effect on economic growth. However, partially, the impact of government spending differs between the three sectors. Expenditures in the health sector have a greater impact on economic growth than those in the education and infrastructure sectors. Although expenditures in these three sectors are important, the effectiveness of government budget management in each sector plays a major role in determining their impact on economic growth. These findings emphasize the importance of efficient and targeted fiscal policies to promote sustainable economic growth. Therefore, this study provides recommendations for the local government of South Sulawesi Province to consider priorities and efficiency in budget allocation in strategic sectors in order to improve community welfare, strengthen regional economic growth, and achieve inclusive and sustainable development.

Keyword: Government Expenditures; Education; Health; Infrastructure; Economic Growth; South Sulawesi.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan suatu daerah. Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya fiskal secara optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. pengeluaran pemerintah daerah, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, merupakan bentuk investasi publik jangka panjang yang diyakini dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kinerja ekonomi secara keseluruhan (Bastias *et al.*, 2010; Novitasi & Arif, 2021). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh sektor swasta, tetapi juga oleh efektivitas pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk fondasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas publik yang memadai. Dalam teori ekonomi klasik dan modern, peran pemerintah sangat ditekankan melalui intervensi belanja publik untuk memacu aktivitas ekonomi, terutama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar (Todaro & Smith, 2009; Wahyudi, 2020). Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam satu dekade terakhir, meskipun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta kualitas layanan publik menjadi tantangan utama dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan signifikan sejak 2019, sementara infrastruktur mengalami fluktuasi signifikan. Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu mendorong laju pertumbuhan yang optimal, seperti terlihat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 1. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2024

Tahun	Pendidikan (Juta)	Kesehatan (Juta)	Infrastruktur (Juta)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	2.624.917.540.846	613.599.031.894	767.380.742.419	6,91
2020	2.699.275.327.038	817.732.783.909	1.081.070.151.180	-0,71
2021	2.868.375.647.496	827.807.551.948	1.125.710.089.060	4,64
2022	2.876.197.559.854	903.710.186.456	734.923.173.358	5,10
2023	3.117.910.013.772	873.062.707.611	873.062.707.611	4,51
2024	2.037.680.000.000	952.540.000.000	428.260.000.000	5,02

Meskipun terdapat alokasi anggaran yang cukup besar, terdapat keraguan mengenai efektivitas belanja tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung dan signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa besar pengaruh pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi penelitian sebelumnya, sejumlah studi telah mengkaji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional (Fazira *et al.*, 2025; Puspitasari *et al.*, 2018) maupun regional (Mandey *et al.*, 2022). Namun, hasilnya menunjukkan temuan yang bervariasi—sebagian menemukan pengaruh signifikan, sebagian lainnya menyatakan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian dalam konteks lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan fiskal tersendiri. Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah, dibutuhkan strategi kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya dianggap sebagai pengeluaran konsumtif, tetapi juga sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam membentuk fondasi pembangunan. Investasi pada pendidikan dan kesehatan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), sementara

pembangunan infrastruktur memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong efisiensi ekonomi (Abrha & Weldeyohans, 2025; (Kaloko et al., 2025; Aschauer, 1989 dalam Mamahit et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh dari ketiga sektor tersebut secara lebih mendalam menggunakan pendekatan ekonometrika berbasis data runtut waktu (*time series*). Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya menggunakan pendekatan data panel antar daerah, sementara penelitian ini mengadopsi data *time series*, yang memungkinkan untuk mengamati hubungan kausal jangka panjang dan efek keterlambatan (*lag effect*) dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi (Bastias, 2010). Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas belanja publik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penganggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Boediono (2001) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, yang menandai terjadinya transformasi struktural dalam perekonomian, termasuk peningkatan produksi barang dan jasa serta perubahan distribusi sektor ekonomi. Dalam kerangka pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan akumulasi modal fisik, tetapi juga keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dan optimalisasi kebijakan fiskal daerah (Yenny & Anwar, 2020). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dilihat sebagai proses dinamis yang berhubungan erat dengan kebijakan publik yang efektif. Todaro dan Smith (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kapasitas produksi suatu wilayah. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, faktor internal seperti investasi pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi teknologi merupakan penentu utama laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Becker, 1975; Romer, 1990). Teori ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*) dan infrastruktur publik dapat menghasilkan efek pengganda terhadap produktivitas dan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, Aghion et al. (2009) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan institusi dan peningkatan kapasitas inovasi lokal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif. Selain faktor-faktor internal, pertumbuhan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas belanja pemerintah, terutama pada sektor-sektor strategis. Penelitian oleh (Nawaa dan Pudjihardjo (2023) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN yang berinvestasi tinggi pada sektor pendidikan dan teknologi memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding negara-negara dengan alokasi anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing wilayah dalam jangka panjang.

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi dana yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat publik. Dalam perspektif ekonomi makro, pengeluaran pemerintah termasuk dalam instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam menstimulasi permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Wahyudi, 2020). Keynes berpendapat bahwa peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output nasional (Abdillah & Primitasari, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan yang mampu memberikan efek multiplier terhadap kesejahteraan masyarakat.

RESEARCH ARTICLE

Secara umum, pengeluaran pemerintah diklasifikasikan dalam dua kategori utama: pengeluaran untuk konsumsi dan pengeluaran untuk investasi. Investasi publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dipandang sebagai bentuk pengeluaran produktif yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang. Teori yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap investasi sangat besar karena diperlukan penyediaan infrastruktur dasar (Mangkosoebroto, 2001). Selanjutnya, pada tahap lanjutan, pola pengeluaran bergeser menuju layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Konsep ini menekankan bahwa struktur pengeluaran pemerintah harus disesuaikan dengan tahapan pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung di suatu daerah. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, terutama pada tingkat provinsi, pengeluaran pemerintah menjadi alat penting untuk menyeimbangkan ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan konsep *welfare state* yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan barang publik (Septiani, 2017). Oleh karena itu, kajian empiris terhadap efektivitas pengeluaran pemerintah—khususnya pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—menjadi krusial untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam perspektif teori modal manusia (*human capital theory*), pendidikan dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan produktivitas individu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Becker (1993) dan Schultz (1961) menekankan bahwa manusia tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai faktor produksi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, semakin besar alokasi anggaran pemerintah pada sektor pendidikan, maka semakin tinggi pula potensi peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah di pasar global. Studi empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kholifaturrohman *et al.* (2023) menemukan bahwa akses terhadap pendidikan formal secara signifikan meningkatkan output ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utama dan Soesanti (2019), serta Verawati Siringoringo dan Purwono (2021), yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dan belanja pendidikan daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, alokasi anggaran pendidikan tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik seperti penyediaan gedung sekolah dan infrastruktur pendukung, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi teknologi pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu (Simarmata & Iskandar, 2022; Panisah *et al.*, 2024). Asnidar *et al.* (2025) menegaskan bahwa pengeluaran pendidikan yang merata akan membantu menciptakan keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan antarwilayah, yang merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan belanja pendidikan secara signifikan terlihat sejak tahun 2017, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan ekonomi jangka panjang.

2.4 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan salah satu komponen vital dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas ekonomi. Dalam kerangka teori modal manusia, kesehatan yang baik menjadi dasar dari kapasitas kerja, ketahanan fisik, dan peningkatan produktivitas individu dalam jangka panjang (Becker, 1993). Pemerintah memiliki peran sentral dalam menjamin tersedianya layanan kesehatan yang merata dan berkualitas melalui alokasi anggaran untuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta program-program promotif dan preventif. Menurut Covey (1990), kesehatan merupakan bagian integral dari produktivitas manusia sehingga perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur

RESEARCH ARTICLE

kesehatan seperti rumah sakit, klinik, sanitasi, dan air bersih bukan hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan (Nasution et al., 2021; Ladung, 2018). Investasi pemerintah pada sektor kesehatan juga terbukti memiliki hubungan positif terhadap indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Yusuf dan Setiawan (2022) menemukan adanya hubungan kausal antara belanja kesehatan dan indeks pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks daerah, pengeluaran sektor kesehatan memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan usia harapan hidup, penurunan beban penyakit, dan penciptaan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Dengan demikian, sektor kesehatan bukan hanya menjadi beban fiskal, tetapi merupakan pilar strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, dituntut untuk mengelola anggaran kesehatan secara efektif agar dapat menjawab tantangan kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5 Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur

Pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur merupakan salah satu komponen strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah berkembang seperti Provinsi Sulawesi Selatan. Infrastruktur berfungsi sebagai *social overhead capital* yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan konektivitas antarwilayah dan memperlancar aliran barang, jasa, serta tenaga kerja. Menurut Faradis dan Afifah (2020), infrastruktur dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu infrastruktur ekonomi seperti jalan dan pelabuhan, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah. Dalam konteks pembangunan daerah, penyediaan infrastruktur dasar oleh pemerintah berfungsi sebagai pemicu peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan output dan pendapatan wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kodoatie (2005) yang menyebutkan bahwa infrastruktur merupakan sistem fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Aschauer (1989) menegaskan bahwa investasi publik dalam infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas multifaktor, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mamahit et al., 2021). Dalam praktiknya, pengeluaran infrastruktur oleh pemerintah daerah mencakup pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga sarana telekomunikasi, yang semuanya merupakan fondasi penting dalam mendukung efisiensi logistik dan investasi sektor swasta. Husen dan Baranyanan (2021) menyatakan bahwa perluasan infrastruktur tidak hanya menambah stok modal fisik, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah pada sektor ini tidak hanya berperan dalam memperbaiki kualitas kehidupan sehari-hari, tetapi juga menciptakan efek ganda yang memperluas kesempatan kerja, menurunkan biaya transaksi ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) secara statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk time series tahunan dari tahun 2012 sampai 2024. Data untuk variabel bebas, yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan data untuk variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi regional yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data mengenai pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor tersebut serta data PDRB untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri atas satu variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi

RESEARCH ARTICLE

(dalam persentase), dan tiga variabel bebas, yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (dalam satuan rupiah). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS), yang dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum model dianalisis, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk memastikan validitas model regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, uji F untuk melihat pengaruh secara simultan, dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel bebas. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 22. Penelitian ini mengadopsi data runtut waktu (time series) selama 13 tahun (2012–2024). Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDRB_t = \beta_0 + \beta_1 Pend_t + \beta_2 Kes_t + \beta_3 Infrac_t + e_t$$

Dimana $PDRB_t$ merupakan Produk Domestik Regional Bruto pada periode t , $Pend_t$ adalah pendidikan, Kes_t adalah kesehatan, dan $Infrac_t$ adalah infrastruktur. Sementara itu, β_0 merupakan konstanta, β_1 , β_2 , dan β_3 merupakan koefisien regresi, serta e_t adalah error term.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk menguji asumsi populasi dan variabel penelitian yang akan dianalisis apakah terdistribusi normal atau tidak. Data dapat dikatakan normal apabila nilai $p > 0,05$, dan apabila nilai $p > 0,05$, maka data dikatakan tidak terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan Teknik *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 2. Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
Pendidikan	0,200	Normal
Kesehatan		
Infrastruktur		
Pertumbuhan Ekonomi		

Pada tabel 2, residual model pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berdistribusi normal dengan nilai sebesar 0,200. Hal ini ditunjukkan oleh Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05 atau 0,200 > 0,05, oleh karena itu data ini sudah berdistribusi normal atau normalitas, maka model yang telah dibuat layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Metode multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa suatu model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Keterangan
<i>Constant</i>	-	-	Bebas Multikolinearitas
Pendidikan	1,607	5,139	
Kesehatan	3,309	5,139	
Infrastruktur	0,297	1,026	

RESEARCH ARTICLE

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 3, menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), dan Infrastruktur (X3) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi ini.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam penelitian ini, maka digunakan uji *Durbin-Watson* (DW).

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Sampel	Nilai Durbin-Watson
13	2,066

Hasil uji pada tabel 4, menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,066 berada di antara $dU=1,8159dU = 1,8159dU=1,8159$ dan $4-dU=2,18414 - dU = 2,18414-dU=2,1841$, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model.

4.1.4 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang lemah.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R^2	<i>Adjusted R²</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,964	0,929	0,906	1,818

Pada tabel 5, hasil dari nilai Adjusted R-Square sebesar 0.698. Yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pendidikan (X1), Kesehatan (X2), dan Infrastruktur (X3) sebesar 90,6% dan sementara sisanya 9,4% dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.1.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai F-hitung > F-tabel, maka model dinyatakan signifikan secara bersama-sama.

Tabel 6. Uji Simultan (Uji F)

Model		F	Sig.
1	Regression Residual Total	39,529	0,000

Berdasarkan tabel 6, nilai F-hitung sebesar 39,529 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti variabel pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.1.6 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

	Coefficients Std. error	t	P (sig.)
<i>Constant</i>	8,373	-3,949	0,003
Pendidikan	8,233	1,607	0,143
Kesehatan	3,428	3,309	0,009
Infrastruktur	1,927	0,297	0,773

Hasil analisis pada tabel 7 menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh setiap sektor pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda-beda secara parsial. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2 Pembahasan

Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan belum menunjukkan dampak yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mandey et al. (2022) dan Asnidar et al. (2025), yang menyatakan bahwa belanja pendidikan belum memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, menurut Human Capital Theory oleh Schultz (1961) dan Becker (1993), pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini mungkin disebabkan oleh kualitas pendidikan yang belum optimal, kurangnya keterkaitan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja, atau lemahnya implementasi program pendidikan. Dari sudut pandang jangka panjang, teori pertumbuhan endogen Romer (1990) menekankan bahwa pendidikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengetahuan dan inovasi. Namun, di Sulawesi Selatan, belanja pendidikan belum menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap inovasi, teknologi, maupun daya saing daerah. Artinya, meskipun secara teoritis pendidikan penting bagi pertumbuhan ekonomi, dampaknya bersifat jangka panjang dan belum terlihat secara langsung. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan dan pengelolaan anggaran pendidikan masih perlu diperbaiki agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hasil Mandey et al. (2022) dan Nasution et al. (2021), yang menunjukkan bahwa belanja di sektor kesehatan berdampak positif dan nyata terhadap kinerja ekonomi. Investasi kesehatan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sesuai Human Capital Theory, kesehatan merupakan bagian dari modal manusia yang mendukung produktivitas; Grossman (1972) menyebutkan bahwa kesehatan memperpanjang usia produktif dan mengurangi absensi kerja, sementara Bloom dan Canning (2000) menekankan bahwa masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif dan inovatif. Di Sulawesi Selatan, pengeluaran di sektor kesehatan diarahkan pada pembangunan fasilitas medis, layanan kesehatan masyarakat, serta program peningkatan gizi, yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kesehatan tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, memperkuat pandangan bahwa sektor kesehatan memiliki peran strategis yang sebanding dengan pendidikan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur di Sulawesi Selatan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Asnidar et al. (2025) dan Ladung (2018), yang menunjukkan bahwa belanja infrastruktur belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan endogen Romer (1990) dan Lucas (1988), infrastruktur termasuk dalam kategori modal fisik yang efeknya baru terlihat dalam jangka panjang. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan telekomunikasi memang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi jika realisasinya masih terbatas atau belum dimanfaatkan secara optimal, maka dampaknya belum terasa secara langsung. Aschauer (1989) menekankan bahwa efektivitas belanja infrastruktur sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan pemanfaatan proyek. Keterlambatan, salah sasaran, atau

RESEARCH ARTICLE

kurangnya keterkaitan dengan sektor produktif dapat menghambat kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa pengeluaran infrastruktur di Sulawesi Selatan belum menunjukkan pengaruh signifikan dalam jangka pendek, meskipun tetap memiliki potensi untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan belum mampu memberikan kontribusi langsung dalam jangka pendek. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang baru berdampak setelah kualitas sumber daya manusia meningkat dan terserap dalam pasar kerja. Tantangan dalam efektivitas kebijakan dan pemanfaatan anggaran juga turut memengaruhi hasil ini. Selanjutnya, pengeluaran pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa kesehatan merupakan elemen penting dalam mendukung produktivitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan output ekonomi. Adapun pengeluaran pada sektor infrastruktur tidak berpengaruh signifikan. Meskipun secara teoritis infrastruktur sangat penting sebagai modal fisik pembangunan, manfaat ekonominya cenderung bersifat jangka panjang dan belum terasa selama periode penelitian. Keterlambatan proyek, pemanfaatan yang belum optimal, serta alokasi anggaran yang kurang terarah menjadi faktor penghambat kontribusinya terhadap pertumbuhan. Akan tetapi, secara simultan, pengeluaran pemerintah pada ketiga sektor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiganya saling melengkapi dan bersama-sama mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ketika dikelola secara terpadu dan efektif.

6. Referensi

- Abdillah, I. I., & Primitasari, N. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(03), 494–503. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.28265>.
- Abhra, T., & Weldeyohans, B. (2025). The role of human capital in economic development: A theoretical analysis. *Journal of Human Resource Management*, 13(2), 30–35. <https://doi.org/10.11648/j.jhrm.20251302.11>.
- Aghion, P., Howitt, P., & Bursztyn, L. (2009). Institutions and non-convergence traps.
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0).
- Asnidar, P., & Hanum, N. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 3(2), 166–181.
- Bastias, D. D., & Purwanti, E. Y. (2010). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969–2009. Skripsi, Universitas Diponegoro.

RESEARCH ARTICLE

- Becker, G. S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. In *National Bureau of Economic Research*.
<https://doi.org/10.1001/Archneur.1986.00520010054022>.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Boediono. (2001). *Pengantar ilmu ekonomi* (4th ed.). BPFE Yogyakarta.
- Covey, S. R. (1990). *The 7 habits of highly effective people*. Free Press.
- David, E., & Canning, D. (2000). The health and wealth of nations. *Science*, 287(5456), 1207–1209.
<https://doi.org/10.1126/science.287.5456.1207>.
- Faradis, R., & Afifah, U. N. (2020). Indeks komposit pembangunan infrastruktur provinsi-provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 33–55.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03>.
- Fazira, Z., Ertika, Y., Tanjung, I. I., Suhendra, N., & Risma, O. R. (2025). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 159–167.
- Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *Journal of Political Economy*, 80(2), 223–255. <http://www.jstor.org/stable/1830580>.
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh pembangunan infrastruktur pelabuhan, infrastruktur jalan, dan infrastruktur jembatan terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Poros Ekonomi*, 10(1), 20–34.
- Kholifaturrohman, R., Floresti, D. A., Mayasari, V., & Rosiana, M. (2023). Kontribusi human capital terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 25(4), 28–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v25i4.11605>.
- Kodoatie, R. J. (2005). *Pengantar manajemen infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Ladung, F. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 20–30. <https://doi.org/10.31850/economos.v1i2.573>.
- Mamahit, V. S., Singkoh, F., & Sampe, S. (2021). Pengaruh pembangunan infrastruktur (jalan) terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat). *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1), 1–4.
- Mandey, A., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah atas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 101–109.
- Nasution, D. P., Daulay, M. T., & Handani, E. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 33–49.

RESEARCH ARTICLE

- Nawaa, F., & Pudjihardjo, M. (2023). Pengaruh pendidikan, teknologi, dan investasi asing langsung terhadap perekonomian lima negara ASEAN. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 60–73. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.1.6>.
- Novitasi, W., & Arif, M. (2021). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketimpangan pendapatan terhadap jumlah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1, 1–22.
- Panisah, Y. M., Maharani, S., Kamilah, S. A., Abid, M. A., Narendra, A., & Zulkarnain, M. (2024). Pengeluaran pemerintah pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 70–85.
- Puspitasari, J. M., Sarfiah, S. N., & Rusmijati. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Periode tahun 2010–2017). *Dinamica: Directory Journal of Economic*, 1(1), 23–41.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102. <https://doi.org/10.3386/w3210>.
- Septiani, N. (2017). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Ekonomi dan Keislaman*, 11(1), 92–105.
- Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022). Pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, jumlah penduduk, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia: Analisa two-stage least square untuk kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 78–94. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.78-94>.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Pembangunan ekonomi* (A. Maulana & N. I. Sallama, Eds.; 11th ed.). PT. Gelora Aksara Pratama.
- Utama, W., & Soesanti, N. (2019). Hubungan antara partisipasi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 136–148. <https://doi.org/10.17509/jpp.v19i1.17139>.
- Verawati Siringoringo, M., & Purwono, R. (2021). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(1), 1539–1547.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran pemerintah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 103–113.
- Yenny, N. F., & Anwar, K. (2020). Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 19. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3181>.
- Yusuf, M., & Setiawan, A. B. (2022). The nexus between health and economic growth: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 23(2), 192–210. <https://doi.org/10.23917/jep.v23i2.20018>.